

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya permasalahan pengelolaan keuangan negara dan potensi *fraud* di sektor publik yang tercermin dari temuan pemeriksaan eksternal.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil penilaian kapabilitas APIP dan maturitas SPIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta data temuan pemeriksaan BPK RI pada periode 2015–2023. Sampel penelitian mencakup kementerian dan lembaga dengan total 611 unit observasi yang memiliki data lengkap selama periode pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar entitas dan antar waktu dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak *evIEWS* 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas implementasi SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah temuan pemeriksaan BPK RI, sedangkan kapabilitas APIP tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian intern lebih tercermin melalui kematangan implementasi sistem dibandingkan peningkatan kapabilitas pengawasan yang bersifat formal dan administratif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengawasan internal di sektor publik serta membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami peran APIP secara lebih substantif. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menempuh pendekatan alternatif, baik secara kualitatif maupun dengan menggunakan proksi operasional, seperti jumlah dan karakteristik penugasan pengawasan guna menjelaskan mekanisme pengawasan internal dalam mereduksi *agency problem* di sektor publik.

**Kata Kunci:** kapabilitas APIP, maturitas SPIP, temuan pemeriksaan BPK, pengawasan internal, pengendalian internal, sektor publik.